

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PENERAPAN ASAS
KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh

Lutvi Dafina Damayanti

NIM.05020422038



**UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lutvi Dafina Damayanti
NIM : 05020422038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Asas Keterbukaan Dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 November 2025

Yang menyatakan,



Lutvi Dafina Damayanti
NIM. 05020422038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lutvi Dafina Damayanti

NIM : 05020422038

Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Asas Keterbukaan Dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan UU No.19 Tahun 2019 Tentang KPK

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 25 November 2025

Pembimbing,



Elva Imeldatur Rohmah, M.H

NIP. 199204022020122018

PENGESAHAN

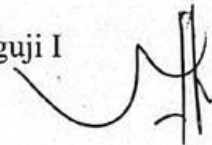
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Lutvi Dafina Damayanti
NIM. : 05020422038
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

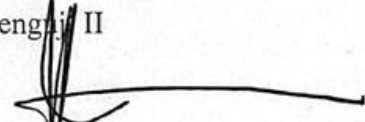
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



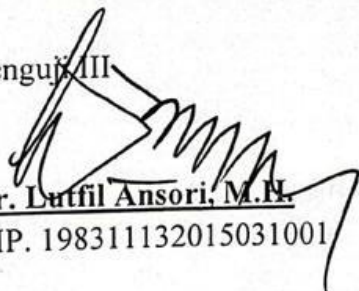
Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP. 199204022020122018

Penguji II



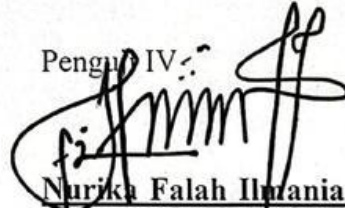
Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji III



Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji IV



Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 16 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lutvi Dafina Damayanti
NIM : 05020422038
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
E-mail address : lutvidafina@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Penerapan Asas Keterbukaan Dan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Maret 2026

Penulis

(Lutvi Dafina Damayanti)

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dengan proses yang sangat cepat tanpa melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menimbulkan kritik terkait kurangnya keterbukaan dan partisipasi publik. Pembentukan undang-undang dinilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan partisipasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 2) menelaah penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dari perspektif *fiqh siyāsah*, yang menekankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umat dalam proses legislasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terkait konsep *fiqh siyāsah*, termasuk analisis deskriptif untuk mengkaji penerapan asas keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta risalah sidang. Bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terkait, dan bahan tersier seperti kamus hukum sebagai panduan literatur. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dari sumber tercetak dan *online*, dengan analisis hukum secara deduktif yang dimulai dari teori umum asas keterbukaan serta partisipasi publik kemudian diterapkan pada pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melibatkan partisipasi publik secara optimal sehingga asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang belum terpenuhi secara memadai. Dari tinjauan *fiqh siyāsah*, proses legislasi tersebut bertentangan dengan prinsip musyawarah atau *shūrah* dan keadilan, khususnya dalam konteks melaksanakan tanggung jawab pemerintahan yang harus berlandaskan kemaslahatan umat.

Penelitian ini menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan asas keterbukaan dan partisipasi publik secara substansial maupun prosedural dalam proses penyusunan undang-undang guna memperkuat legitimasi serta meningkatkan kualitas produk hukum yang dihasilkan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga perlu didorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana keterlibatan tersebut tidak hanya merupakan hak demokratis namun juga merupakan bagian dari tanggung jawab dan tuntunan ajaran agama sebagaimana tercermin dalam konsep *fiqh siyāsah*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Landasan Teori.....	19
H. Definisi Operasional	23
I. Metode Penelitian	26
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN, PARTISIPASI PUBLIK DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	32
A. Teori Pembentukan Perundang – Undangan	32
1. Pengertian dan Fungsi Pembentukan Perundang-undangan	32
2. Asas-asas Pembentukan Perundang-undangan	37
3. Proses Pembentukan Perundang-undangan.....	45
B. Partisipasi Publik dalam Legislasi.....	64
1. Pengertian Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi	64
2. Mekanisme dan Bentuk Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi	73
C. <i>Fiqh Siyāsah</i>.....	82
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	82
2. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah</i>	86
3. Prinsip Musyawarah dalam Pembentukan Perundang-undangan	90

BAB III PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	97
A. Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	97
B. Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ..	104
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	119
A. Konsep <i>Fiqh Siyāсах Dustūriyah</i> dalam Pembentukan Undang-Undang ..	119
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyāсах Dustūriyah</i> Terhadap Penerapan Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.....	127
BAB V PENUTUP.....	138
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA.....	140
LAMPIRAN.....	152
BIOGRAFI PENULIS.....	161

DAFTAR PUSTAKA

i. Buku

- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Fakhry Amin. *Ilmu Perundang-undangan*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengujian Formil Undang-undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Lutfil Ansori. *Legal Drafting: Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*.” Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Yogyakarta: Suara Baru Pustaka, 2016.
- Nelvitia Purba, Mukidi, dan Sri Rizki Hayaty. *Teori Peraturan Perundang-undangan*. Banten: CV. A.A. Rizky, Juni 2022.
- Kementerian Agama Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019

ii. Jurnal dan Skripsi

- Ade Yusroni Rifqi. “Eksistensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Lembaga KPK Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021): 1-57.
- Adelia Fernanda Lawani, Audi H. Pondang, dan Delasnova S. S. Lumintang. “Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia.” *Lex Administratum* 9, no. 2 (2021): 69-79.
- Alfian A. Manupapami, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Jumiran. “Evaluation Of The Performance Of The Corruption Eradication Commission (KPK) In

Tackling Corruption In The Public Sector.” *Delictum : Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2024): 1-13.

Amaluddin, Zainal, dan Erjan Saputra. “Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.” *Al-Sulthaniyah* 10, no. 1 (2021): 60–75.

Andriansyah, Fery, dan Anom Wahyu Asmorojati. “Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Politik Hukum Ketatanegaraan Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.” *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 249-273.

Aprilliani, Elisabeth Dian, Putri Zahva Prameswari, dan Andika Wibowo. “Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.” *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 200-208.

Ardila Putri Ananda Mandak. “Penerapan Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.” *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum* 13, no.5 (2024): 1-11.

Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi, dan Indah Nadilla. “Urgensi Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 212-234.

Ariani, Devi, dan Lusy Liany. “Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-Azas Pembentukan Perundang-Undangan.” *Adil: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021): 46-67.

Asaad, Misbahuddin. “Rekonseptualisasi Musyawarah Dalam Al-Qur’an Dan Hadis Berdasarkan Penafsiran Dan Pemahaman Praktis Di Indonesia.” *Mushaf Journal : Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 355-367.

Asma, Siti Nor. “Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam.” *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan* 1, no. 2 (Mei 2024): 32-37.

- Astary, Komang Trisma Berlianti, Komang Febrinayanti Dantes, I Gusti Ayu, dan Apsari Hadi. *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Telekonferensi Terhadap Kehadiran Pemegang Saham Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia* 6, no.2 (2025): 68-84.
- Aulia, Dina, dan Hidayat Rumatiga. "Konsep Pemerintahan Islam Dalam Perspektif Demokrasi Dan Nilai Kepemimpinan." *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 4 (2025): 4662-4672.
- Azizah, Erlina Nur, Nida Handayani, dan Farriha Azkia Hanum. "Transformasi Pusat Parlemen Indonesia: Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Legislasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024): 8681-8685.
- Azmi, Muhammad Ardian Maulana, dan Akhmad Zaki Yamani. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang (Analisis Dampak Dan Manfaat)." *Interdisciplinary Explorations In Research Journal (IERJ)* 3, no. 2 (Agustus 2025): 327-341.
- Bayu, Chandra. "Transformasi Kelembagaan KPK: UU KPK Sebagai Kebijakan Pencegahan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 84-97.
- Berry, Michael Frans. "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan." *Muhammadiyah Law Review* 2, no.2 (Juli 2018): 88-91.
- Beta Utami. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (2022): 1-86.
- Christina Clarissa Intania. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Peneliti Hukum The Indonesian Institute Center For Public Policy Research* (2024): 1-36.
- Damanik, Eko Rinaldo, Thea Farina, dan Satriya Nugraha. "Krisis Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional Dan Pengabaian Aspirasi Rakyat." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 2 (2025): 2518-2540.
- Darin, Usman Moonti dan Sri Indriyani S. Dai. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 11-21.

- Dewi Sartika Mokoagow. "Abusive Law Making (Analisis Penurunan Partisipasi Publik Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang)." *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, no.7 (Desember 2024): 4733-4748.
- Dewy, Shinta. "Peran Partisipasi Masyarakat Sebagai Hak Konstitusional Dalam Pembentukan Undang Undang Di Indonesia." *Jurnal Transparansi Hukum* 8, no.1 (2025): 266-276.
- Dianisa, Tifani Rizki, dan Gayatri Dyah Suprobawati. "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia." *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 2 (2022): 298-305.
- Dwi Kurniawan, Itok, Pipit Widiatmaka, dan Samuel Bintang Robby. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Bentuk Impementasi Demokrasi." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 2 (2023): 198-213.
- Fajar Kamizi, Sarkowi, Marzuki, dan Dodi Irawan. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyash Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *Elqonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 17-24.
- Fernanda, Sultan Zora, dan Idul Rishan. "Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi Dan Efektivitas KPK Dalam Pemberantasan Korupsi." *Palar (Pakuan Law Review)* 10, no. 2 (2024): 133-141.
- Hafifurrahman dan Azhar Kasim, "Partisipasi Publik Dalam Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)" *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 9, no.1 (2023): 126-137.
- Hakim Tafuzi Mu'iz, Dzikrul, dan Uril Bahrudin. "Formulasi Moderasi Beragama Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Sebagai Basis Mewujudkan Masyarakat Madani." *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal* 6, no. 1 (2023): 47-57.
- Hasmiza, Anasri, M. Arif, Dan Abdul Haris. "Konsep Pendidikan Islam: Telaah Model Pendidikan 'Rasulullah sebagai Role Model Pendidik," *Research And Development Journal Of Education* 9, no. 1 (2023): 27-33.

Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, dan Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun." *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 7, no. 4 (2025): 3078–3092.

Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan Dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd Serta Relevansinya Pada Kinerja Dpr." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022): 146-164.

Hutomo, Erlangga Chandra, Na'ilah Fadhilah, Alvin Satria Rahmanda, dan Zidni Dwi Novri Atmojo. "Tinjauan Yuridis-Empiris Atas Transparansi Legislasi DPR Studi Kasus Pembahasan RUU TNI Di Luar Gedung Parlemen." *Jurnal Dimensi Hukum* 9, no. 7 (2025): 12-23.

Huzaeni, Mohamad Roky, dan Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 2 (2021): 213-230.

Irawan, Feri. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Siyasahdusturiyah (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)." *Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2023): 1-111.

Istika, Nayla Adelina, dan Supardi Supardi. "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 460-478.

Kafin Muhammad. "Perubahan Mekanisme Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JIL: Journal Of Indonesian Law* 4, no. 1 (2023): 1-26.

Kartika Aprilya, Putry, dan Agus Tohawi. "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1-15.

Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryal, "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, (2020): 1-68.

Kusuma, Aditama Candra, Ligina Tesalonika, Rofi Ayyasy, Wahidul Halim, Anis Fauzan, Handoyo Prasetyo, Atik Winanti. "Peran Lembaga Legislatif Dalam Konfigurasi Politik Hukum: Antara Aspirasi Publik Dan Kepentingan Politik Untuk Mencapai Karakteristik Produk Hukum." *Jurnal Hukum Statuta* 4, no. 1 (2024): 1-15.

Lalu Hartawan Mandala Putra dan Durohim Amnan. "Redefinisi Makna Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 171-180.

Lira Sopi Ema, Erwin Permana, Suatang, Dan Kurniati. "Membangun Politik Yang Berakhlak: Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sistem Demokrasi." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 210-220.

Manullang, Sardjana Orba, Yessy Kusumadewi, Henry Kristian Siburian, dan Baren Sipayung. "Problematisa Hukum atas Pembentukan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi" *Journal on Education* 5, no.2 (2023): 4886-4897.

Mardona Siregar dan Mustafid. "Sinergi Fiqh Siyasah Dan Konsep Checks And Balances Dalam Hukum Tata Negara Untuk Pemberantasan Korupsi." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2025): 5664-5674.

Maria One Oktavia. "Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurist-Diction* 5, no. 4 (2022): 1419-1434. <https://doi.org/10.20473/Id.V5i4.37337>.

Marjan Miharja, Mugiyono, Dan Wahyu Mustajab. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Media Bina Ilmiah* 15, no. 5 (Desember 2020): 4479-4488.

Mayyadah, Putri, Efa Rodiah Nur, Dan Ahmad Sukandi. "Review Of Fiqh Siyasah Tanfidziyah On The Implementation Of The Performance Of The Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency." *Jurnal Hukum Sehasen* 11, no. 1 (2025): 271-280.

Mochtar, Zainal Arifin. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 321-344.

Mohamad Muspawi. "Literatur Review: Operasionalisasi Variabel dalam Penelitian Pendidikan: Teori dan Aplikasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no.3 (2024): 42925-42931.

Mohammad Zulfahmi dan Rosalia Dika Agustanti. "Cacat Mekanisme Pelaksanaan Revisi UU KPK 2019 Dan Perbandingan Substansi Serta Dampak Terhadap Kinerja KPK." *Perahu (Penerangan Hukum) : Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 1 (2024): 139-155.

Muhammad Ikrom, Muhammad Hirsu Maulana, Jihan Zahirah Rasyidah, dan Umar Al-Faruq. "Peradaban Islam Di Masa Khulafaurrasyiddin." *Journal Of Religion And Social Community* 1, no. 2 (2024): 50-56.

Muhammad Irham W, Adi Aprian, Giyats Rifa'i Afifi, Putri Indraswari, dan Muhammad Fadhli Rizqi. "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia." *Jurnal Ikamakum* 3, no. 1 (2023): 324-334.

Mulia, Muji, dan Zakki Fuad Khalil. "Tata Kelola Pemerintahan Dalam Perspektif Syariah (Analisis Penerapan Syariat Islam Di Aceh)." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 3, no. 1 (2021): 97-106.

Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti, dan Indah Nazulfa, "Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Constitution Journal* 3, no. 2 (2024): 193-210.

Nabiella Aulia. "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Harmonisasi Legislasi Hukum Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021): 1-75.

Napitupulu, Bong Bong Prakoso. "Peran Partisipasi Publik dalam Penguatan Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Journal of Administration and International Development* 4, no.2 (2024): 81-89.

Nur Fathimah Azzahra Syafril dan Fitriani Ahlan Sjarif, "Politik Hukum Pengaturan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dari Masa Ke Masa," *PALAR (Pakuan Law Review)* 9, no.1 (2023): 1-15.

- Nawir. "Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no.7 (2025): 1-10.
- Oktavia, Nasya. "Aspirasi Publik Sebagai Pondasi Pembentukan Undang- Undang Yang Berkeadilan." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no.1 (Januari 2025): 266–279.
- Pradesa, Dedy. "Pengambilan Keputusan Khalifah Umar Bin Khattab Dalam Pemberian Tunjangan Wajib." *Tanzhim: Jurnal Dakwah Terprogram* 2, no. 1 (2024): 71-94.
- Pran Mario Simanjuntak, Rizky Julranda, dan Sultan Fadillah Effendi. "Quo Vadis: Urgensi Penerapan Asas Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan Di Indonesia." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 2 (2022): 1-10.
- Prasojo, Hermawan. "Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, No. 4 (2025): 668-688.
- Putri Anggraini, Efa Rodiah Nur, dan Fathul Mu'in. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 124-138.
- Putri, Utari Lorensi, dan Sulastri Caniago. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 193-203.
- Qurbani, Indah Dwi, dan Zamzabila Abdillah Syakur. "Implementasi Prinsip Negara Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Amerika Serikat." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, no. 1 (2023): 485-514.
- Rinaldo, M. Edwar, dan Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading In Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 64-84.

Rinjani Devina Suri dan Artha Dini Akmal, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengaduan Pelaksanaan Pelayanan Publik di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 1, (2025): 4596-4604.

Rohinun, Fitria Nur Afifatur, Asyroh Mustajab Riyadly, Tony Gunawan, dan Nur Jannani. "Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik" *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no.1 (2023): 139-165.

Rona Apriana Fajarwati. "Akomodasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2023): 1-265.

Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis" *Journal Law and Government* 2, no.1 (2024): 46-58.

Rosyidi, Muhammad, Mahmuji. "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2024): 65-76.

Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy, Rifka Safira, Dan Rahmiati - Rahmiati. "Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib Dan Penerapan Tahkim Dalam Penyelesaian Konflik: Analisis Kasus Pertempuran Siffin Dengan Pendekatan Hukum Empiris Dan Perspektif Islam." *Marwah Hukum* 2, no. 2 (2024): 41-45.

Setiawan, Deden. "Implementasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perda Kabupaten Kaur: Perspektif Fiqih Siyasah." *Journal Of Law And Legal System* 1, no. 2 (2025): 97-103.

Setiawan, Risman. "Konsep Omnibus Law Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 6 (2025): 4456-4462.

Sherly Widya Hapitasari, "Analisis Hadis Tematik tentang Musyawarah (Syura) dan Implementasinya dalam Demokrasi Kontemporer," *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2025): 21-38.

Siagian, Ade Onny, Dan Andrew Shandy Utama. "Penerapan Asas Hukum Dalam

Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan Yang Berkeadilan Dan Partisipatif.” *TIN: Terapan Informatika Nusantara* 2, no. 2 (2021): 58–64.

Sihombing, Anggi Nita Sari. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.” *UIN Sumatera Utara* (2021) 1–79.

Sirait, Theresa Yolanda, Bintang Me Naibaho, Janpatar Simamora, dan Leonardo David Simatupang. “Inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Independen.” *Nommensen Journal Of Legal Opinion* 1, no. 01 (2020): 1-26.

Siti Qomariah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Prosedur Pembentukan Undang-Undang di Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Siyāsah: Jurnal Hukum Tata Negara* 6, no.1 (2023): 53-63.

Sundari dan Zulfatul Amalia. “Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Demokrasi.” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 3 (2020): 21-30.

Ulfah. “Tinjauan Sultah Tasyri’iyyah Terhadap Kekosongan Hukum Dalam Memformulasikan Peraturan Daerah Provinsi No 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Oleh DPRD Tanah Datar.” Institut Agama Islam Negri (IAIN) Batusangkar (2021): 1-64.

Wahyudi, Intan Fitri Meutia, dan Devi Yulianti, “Implementasi Open Government Melalui Partisipasi Masyarakat Pada Formulasi Kebijakan (Studi Pada Raperda Penyelenggaraan Pesantren Di Provinsi Lampung).” *Administrativa Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 3, no.3 (2021): 254-266.

Wali, Ahmad, Asep Suherman, dan Arie Elcaputera. “Menakar Partisipasi Bermakna dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Aspiratif: Telaah Terhadap Penataan Legislasi Indonesia” *Lex Jurnalica* 19, no.3 (2022): 297-305.

Wardani, Riska Putri, Dan Sunny Ummul Firdaus. “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Korehensi Teori Pembentukan Undang-Undang.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 724-733.

Widyantari, Padma, dan Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117-123.

Wulandari, Amanda. "Tinjauan Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat." *Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar* (2025): 1-83.

Yahwala Harahap, Muhammad Fadly, Dan Rahmad Efendi Rangkuti. "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 6, no. 1 (2025): 205-219.

Yamani, Akhmad Zaki. "Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Fikih Siyāṣah: Menjembatani Nilai-Nilai Islam dan Sistem Demokrasi," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 9, no.3 (2025): 1-13.

Yasser, Muhammad. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 Ditinjau Dalam Fiqh Siyasah (Studi Di DPRD Sumatera Utara)." *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2019): 1-85.

Yulia Irnawati. "Analisis Yuridis Dan Fiqh Siyasah Dusturiyyah Terhadap Independensi KPK Pasca Perubahan Kedua UU No 19 Tahun 2019 Atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya* (2023): 1-130.

Yuni Putri Dewantara dan Agustin Widjiastuti. "Peran Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Negara Hukum." *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 22, no. 3 (2025): 439-450.

Yusuf, Adzinul Fuadhi. "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Konsep Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahidpekalongan* (2025): 1-62.

iii. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Yang Telah Mengalami Tiga Kali Perubahan, Yaitu Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Dan Kemudian Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019.

iv. Berita

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.”.

<http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/41581/Perpres-No-87-Tahun-2014>.

Humas. “Apa Yang Perlu Diketahui Untuk Membuat Peraturan Perundang-undangan?” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, February 25, 2015. <https://setkab.go.id/apa-yang-perlu-diketahui-untuk-membuat-peraturan-Perundang-undangan/>.

“Lima Argumen Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Cacat Hukum dan Harus

Dibatalkan.” *pshk.or.id*, January 28, 2020. [https://www.pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-Undang-Undang-Komisi Pemberantasan Korupsi-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/](https://www.pshk.or.id/rr/lima-argumen-revisi-Undang-Undang-Komisi-Pemberantasan-Korupsi-cacat-hukum-dan-harus-dibatalkan/).

NU Online. “Kodifikasi Al-Qur’an Di Masa Utsman Bin Affan RA.” April 30, 2021. <https://islam.nu.or.id/ilmu-al-quran/kodifikasi-al-qur-an-di-masa-utsman-bin-affan-ra-YQbsl>.

WALHI. “Pemerintah Menegaskan Pembangkangan Terhadap Konstitusi dan Mengkhianati Rakyat.” December 31, 2022. <http://www.walhi.or.id/pemerintah-menegaskan-pembangkangan-terhadap-konstitusi-dan-mengkhianati-rakyat>.

Zhafir, Turkey Al. “Syura; Pengambilan Keputusan dalam Perspektif Ibn Taimiyyah | Bincang Syariah.” Sejarah Islam. BincangSyariah | Portal Islam Rahmatan lil Alamin, May 26, 2022. <https://bincangsyariah.com/khazanah/sejarah-islam/syura-pengambilan-keputusan-dalam-perspektif-ibn-taimiyyah/>.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)